

Akuntabilitas Spiritual dan Material dalam Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Cireundeu

Dea Amelia¹, Nais Tuti Nurdini², Itsna Zakia Nurlatifah³, Roro Janri Rahmala⁴, Elfa Julianti⁵, Azka Rafi Munandar⁶

^{1,2,3,4,5,6} Prodi Akuntansi, Universitas Pasundan

E-mail: ameldea714@gmail.com¹, naisastuti257@gmail.com², itsnalcy@gmail.com³, rorojanrir@gmail.com⁴, elfajulianti6@gmail.com⁵, azkarafi15@gmail.com⁶

Article Info

Article history:

Received January 10, 2026

Revised January 13, 2026

Accepted January 17, 2026

Keywords:

Spiritual Accountability;
Material Accountability;
Ethno-Accounting; Food
Security; Cireundeu Indigenous
Village

ABSTRACT

This study aims to examine how spiritual and material accountability practices support food security in the Cireundeu Indigenous Village through an ethno-accounting perspective. The research employs a qualitative approach with an ethnographic design. A total of 12 informants, consisting of customary elders, cassava farmers, food barn managers, food processors, and community members, were selected using purposive sampling based on their involvement and knowledge of the indigenous food system. Data were collected through participant observation, semi-structured in-depth interviews, and document analysis of customary regulations and food management records. Data analysis was conducted using thematic coding and cultural interpretation. The findings indicate that food security in the Cireundeu community is sustained through the integration of spiritual and material accountability. Spiritual accountability functions as a moral foundation that guides collective behavior and commitment to ancestral mandates, while material accountability is manifested through collective and sustainable management of cassava-based food production, storage, and distribution. The integration of these dimensions forms an effective non-formal accountability system that supports long-term food security beyond modern formal accounting frameworks.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 10, 2026

Revised January 13, 2026

Accepted January 17, 2026

Kata Kunci:

Akuntabilitas Spiritual;
Akuntabilitas Material; Etno-
Akuntansi; Ketahanan Pangan;
Kampung Adat Cireundeu

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana praktik akuntabilitas spiritual dan material berperan dalam menopang ketahanan pangan masyarakat Kampung Adat Cireundeu melalui perspektif etno-akuntansi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain etnografi. Informan penelitian berjumlah 12 orang yang terdiri atas sesepuh adat, petani singkong, pengelola lumbung pangan, pengolah pangan, dan anggota komunitas, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka dalam sistem pangan adat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam semi terstruktur, dan studi dokumen terkait aturan adat serta pengelolaan pangan. Analisis data dilakukan melalui pengkodean tematik dan interpretasi kultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan pangan masyarakat Cireundeu ditopang oleh integrasi akuntabilitas spiritual dan material. Akuntabilitas spiritual berfungsi sebagai landasan moral

yang mengarahkan perilaku dan komitmen kolektif terhadap amanah leluhur, sementara akuntabilitas material diwujudkan melalui pengelolaan produksi, penyimpanan, dan distribusi pangan berbasis singkong secara kolektif dan berkelanjutan. Integrasi kedua dimensi tersebut membentuk sistem akuntabilitas nonformal yang efektif dalam menjaga keberlanjutan pangan komunitas di luar kerangka akuntansi formal modern.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Dea Amelia
Universitas Pasundan
Email: ameldea714@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, isu ketahanan pangan dan keberlanjutan menjadi perhatian global seiring meningkatnya ketergantungan pada sistem pangan industrial dan komoditas tunggal. Berbagai studi menunjukkan bahwa pendekatan pengelolaan pangan modern yang bersifat teknokratis dan berbasis efisiensi ekonomi sering kali mengabaikan dimensi sosial, budaya, dan spiritual yang justru berperan penting dalam menjaga keberlanjutan jangka panjang (Bebbington et al., 2020; Gray, 2021). Akibatnya, sistem pangan modern cenderung rentan terhadap guncangan eksternal seperti fluktuasi pasar, perubahan iklim, dan krisis distribusi.

Sejumlah kajian terbaru menekankan pentingnya perspektif berbasis nilai dalam memahami ketahanan pangan, dengan memandang pangan tidak semata sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai entitas sosial dan kultural yang terikat pada sistem makna tertentu (Bebbington et al., 2020). Dalam konteks ini, masyarakat adat menjadi aktor penting karena memiliki sistem pengelolaan pangan yang terintegrasi dengan nilai spiritual, norma sosial, dan tanggung jawab kolektif. Studi internasional menunjukkan bahwa sistem pangan adat cenderung lebih resilien karena ditopang oleh etika ekologis dan akuntabilitas berbasis komunitas yang kuat (Whyte, 2018; Escobar, 2020).

Kampung Adat Cireunde di Jawa Barat merupakan salah satu contoh komunitas adat yang berhasil mempertahankan ketahanan pangan berbasis singkong selama lebih dari satu abad. Ketahanan pangan di Cireunde tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fisik bahan pangan, tetapi juga berakar pada nilai spiritual, pandangan hidup, serta mekanisme sosial yang mengatur relasi antara manusia, alam, dan leluhur. Dalam situasi ketika sebagian besar masyarakat Indonesia sangat bergantung pada beras sebagai pangan pokok, Cireunde menunjukkan model alternatif yang tidak hanya tangguh secara material, tetapi juga bermakna secara kultural dan spiritual.

Dari perspektif akuntansi, praktik pengelolaan pangan masyarakat adat seperti Cireunde menantang pemahaman arus utama yang memosisikan akuntabilitas sebagai mekanisme formal, hierarkis, dan berbasis pelaporan numerik. Literatur akuntansi kritis menegaskan dalam konteks sosial tertentu, akuntabilitas tidak selalu dimaknai sebagai kewajiban administratif,

melainkan berkembang sebagai praktik bermakna yang dibentuk oleh nilai, etika, dan pengalaman kolektif masyarakat tempat praktik tersebut dijalankan (Gray, Adams, & Owen, 2014; Roberts, 2018). Dalam komunitas komunal, akuntabilitas sering kali diwujudkan melalui relasi moral, ritual, dan norma adat yang tidak terdokumentasi secara formal, tetapi berfungsi efektif sebagai mekanisme pengendalian sosial (McKernan & Kosmala, 2019).

Meskipun demikian, kajian akuntansi arus utama masih relatif terbatas dalam mengkaji praktik akuntabilitas berbasis komunitas adat, khususnya yang mengintegrasikan dimensi spiritual dan material dalam konteks ketahanan pangan. Sebagian besar penelitian cenderung memisahkan aspek ekonomi, budaya, dan spiritual, sehingga belum mampu menangkap akuntabilitas sebagai praktik kehidupan yang utuh. Selain itu, studi akuntansi masih didominasi oleh konteks organisasi formal seperti perusahaan dan lembaga pemerintah, sementara praktik pertanggungjawaban berbasis adat relatif terpinggirkan dalam diskursus akademik.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana akuntabilitas spiritual dan material terintegrasi dalam praktik ketahanan pangan masyarakat Kampung Adat Cireunde melalui pendekatan etno-akuntansi. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap praktik akuntansi yang berakar pada budaya, nilai, dan pengalaman keseharian masyarakat, yang tidak selalu terwujud dalam bentuk pencatatan formal. Dengan menempatkan akuntabilitas sebagai praktik sosial, spiritual, dan material yang saling terkait, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang akuntabilitas di luar kerangka akuntansi modern serta memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan etno-akuntansi dan kebijakan ketahanan pangan berbasis kearifan lokal.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi eksplisit antara akuntabilitas spiritual dan material dalam praktik ketahanan pangan masyarakat adat melalui perspektif etno-akuntansi, yang masih jarang dikaji dalam literatur akuntansi Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik pangan lokal, tetapi juga memposisikan praktik tersebut sebagai sistem akuntabilitas alternatif di luar akuntansi formal modern.

KAJIAN LITERATUR

Akuntabilitas dalam Perspektif Sosial dan Kultural

Dalam kajian akuntansi kontemporer, akuntabilitas tidak lagi dipahami semata-mata sebagai mekanisme pelaporan formal yang berorientasi pada angka dan kepatuhan administratif. Berbagai studi kritis menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan konstruksi sosial yang dibentuk oleh nilai, norma, relasi kekuasaan, serta konteks budaya tempat praktik tersebut dijalankan (Gray, Adams, & Owen, 2014; Roberts, 2018). Dalam konteks ini, akuntabilitas berfungsi sebagai sarana untuk menjaga legitimasi sosial dan membangun kepercayaan antaraktor, bukan sekadar sebagai alat evaluasi kinerja berbasis indikator kuantitatif.

Pendekatan sosial terhadap akuntabilitas menekankan bahwa bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dan nilai kolektif masyarakat. Pada komunitas dengan kohesi sosial yang kuat, akuntabilitas sering diwujudkan melalui praktik informal seperti musyawarah, norma adat, dan pengawasan sosial berbasis moral. Mekanisme ini, meskipun tidak terdokumentasi secara formal, terbukti mampu menciptakan keteraturan dan disiplin kolektif yang berkelanjutan (McKernan & Kosmala, 2019).

Akuntabilitas Spiritual sebagai Landasan Moral

Akuntabilitas spiritual merujuk pada bentuk pertanggungjawaban yang berakar pada keyakinan transendental, nilai sakral, serta relasi manusia dengan Tuhan, leluhur, atau kekuatan supranatural. Dalam kerangka ini, individu tidak hanya merasa bertanggung jawab kepada sesama manusia atau institusi sosial, tetapi juga kepada entitas spiritual yang diyakini memiliki otoritas moral tertinggi. (McKernan & Kosmala, 2019) menegaskan bahwa akuntabilitas spiritual membentuk mekanisme pengendalian internal yang bersifat reflektif dan berbasis kesadaran, bukan paksaan eksternal.

Dalam masyarakat adat, akuntabilitas spiritual sering dilembagakan melalui ritual, pantangan, dan aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Pelanggaran terhadap aturan tersebut tidak hanya dipahami sebagai kesalahan sosial, tetapi juga sebagai bentuk pengingkaran terhadap amanah leluhur dan identitas kolektif. (Supriyanto, 2021) menunjukkan bahwa nilai sakral dalam masyarakat adat berfungsi sebagai sumber legitimasi yang kuat dalam mengatur perilaku sosial dan menjaga integritas komunitas.

Akuntabilitas Material dan Pengelolaan Sumber Daya

Akuntabilitas material berkaitan dengan tanggung jawab atas pengelolaan sumber daya fisik dan ekonomi guna menjamin keberlanjutan kehidupan bersama. Dalam konteks pangan, akuntabilitas material mencakup pengaturan produksi, penyimpanan, distribusi, dan konsumsi sumber pangan secara adil dan berkelanjutan. Studi (Wicaksono, 2021) menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki pengetahuan inventori berbasis pengalaman yang mampu menggantikan fungsi sistem pencatatan modern dalam memastikan kecukupan persediaan.

Praktik pengelolaan pangan berbasis komunitas sering kali menempatkan tanggung jawab kolektif sebagai prinsip utama. Hal ini memungkinkan terciptanya sistem pengawasan bersama yang tidak bergantung pada dokumen formal, tetapi pada kepercayaan, pengalaman, dan konsensus sosial. (Prabowo, 2022) menyebut mekanisme ini sebagai *embedded accountability*, yakni akuntabilitas yang melekat dalam praktik kehidupan sehari-hari dan dijalankan secara alami oleh anggota komunitas.

Etno-Akuntansi dan Praktik Akuntabilitas Masyarakat Adat

Etno-akuntansi berkembang sebagai pendekatan alternatif yang berupaya memahami praktik akuntansi dalam konteks budaya lokal dan pengalaman keseharian masyarakat. Pendekatan ini menolak pandangan universalistik akuntansi modern dan menekankan bahwa praktik pertanggungjawaban harus dipahami sesuai dengan sistem nilai dan logika budaya komunitas yang bersangkutan (Ahrens & Chapman, 2020). Dalam kerangka etno-akuntansi, akuntansi tidak selalu hadir dalam bentuk laporan keuangan, tetapi dapat termanifestasi melalui simbol, narasi, ritual, dan praktik sosial.

Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki sistem akuntabilitas yang bersifat holistik, mengintegrasikan dimensi ekologis, sosial, ekonomi, dan spiritual (Whyte, 2018; Escobar, 2020). Sistem ini terbukti lebih adaptif dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan dan krisis pangan karena didukung oleh etika ekologis dan solidaritas sosial yang kuat.

Ketahanan Pangan Berbasis Nilai Lokal

Ketahanan pangan dalam perspektif masyarakat adat tidak hanya dimaknai sebagai ketersediaan pangan secara fisik, tetapi juga sebagai kemampuan komunitas mempertahankan relasi harmonis antara manusia, alam, dan nilai budaya. (Food and Agriculture Organization, 2021) menekankan bahwa sistem pangan lokal berbasis komunitas memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan rumah tangga dan keberlanjutan sosial. (Rosol et al., 2022) menambahkan bahwa keterlibatan aktif komunitas dalam pengelolaan pangan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif.

Dalam konteks ini, pangan tidak sekadar diposisikan sebagai komoditas ekonomi, tetapi sebagai medium identitas dan keberlanjutan budaya. Filosofi pangan yang dianut oleh simbol adat menjadi dasar dalam menilai kecukupan, kesejahteraan, dan etika kehidupan. Konsep ini sejalan dengan gagasan substance-based accountability yang menekankan substansi keberlanjutan hidup dibandingkan simbol kesejahteraan formal (Hakim, 2022; Gray, 2021).

Sintesis Kajian

Berdasarkan kajian literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam masyarakat adat merupakan praktik multidimensional yang mengintegrasikan aspek spiritual, material, sosial, dan ekonomi. Pendekatan etno-akuntansi memberikan kerangka konseptual yang relevan untuk memahami praktik tersebut secara utuh, terutama dalam konteks ketahanan pangan. Namun demikian, kajian yang secara spesifik mengkaji integrasi akuntabilitas spiritual dan material dalam praktik pangan masyarakat adat, khususnya di Indonesia, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengkaji praktik akuntabilitas masyarakat Kampung Adat Cireundeu sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan literatur etno-akuntansi dan ketahanan pangan berbasis kearifan lokal.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas akuntabilitas spiritual, pengelolaan pangan adat, dan etno-akuntansi secara terpisah, masih sedikit studi yang mengkaji bagaimana dimensi spiritual dan material tersebut beroperasi secara simultan sebagai satu sistem akuntabilitas yang utuh, khususnya dalam konteks ketahanan pangan masyarakat adat Indonesia.

Proposisi Penelitian

Berdasarkan kajian literatur dan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini disusun berdasarkan proposisi sebagai berikut:

Proposisi 1:

Praktik ketahanan pangan masyarakat adat dibentuk oleh integrasi akuntabilitas spiritual dan material yang berfungsi sebagai sistem pengendalian sosial nonformal.

Proposisi 2:

Akuntabilitas spiritual berperan sebagai landasan moral yang mengarahkan perilaku individu dan kolektif dalam pengelolaan pangan masyarakat adat.

Proposisi 3:

Akuntabilitas material memastikan keberlanjutan sistem pangan melalui pengelolaan sumber daya pangan secara kolektif dan berbasis nilai lokal.

Proposisi 4:

Integrasi akuntabilitas spiritual dan material membentuk sistem akuntabilitas khas yang berbeda dari model akuntansi formal modern dan menopang ketahanan pangan jangka panjang masyarakat adat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain etnografi untuk memahami praktik akuntabilitas dalam kehidupan sosial masyarakat Kampung Adat Cireundeu, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap praktik pertanggungjawaban yang tidak terdokumentasi secara formal, tetapi hadir dalam rutinitas, simbol adat, dan relasi sosial sehari-hari (Ahrens & Chapman, 2020).

Keterbatasan waktu penelitian lapangan diimbangi dengan pemusatan observasi pada aktivitas kunci yang berkaitan langsung dengan praktik ketahanan pangan adat, seperti budidaya singkong, penyimpanan hasil panen di leuit, kegiatan ritual adat, serta mekanisme distribusi pangan. Informan penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam secara semi terstruktur dengan tokoh adat, sesepuh, petani, pengelola lumbung, ibu rumah tangga, dan generasi muda yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam sistem pangan dan kedalaman pengetahuan. Selain itu, studi dokumen dilakukan terhadap aturan adat, arsip lokal, dan catatan historis pengelolaan pangan.

Analisis data dilakukan melalui pengkodean tematik dan interpretasi kultural untuk mengidentifikasi pola akuntabilitas spiritual dan material. Peneliti menempatkan diri secara reflektif sebagai instrumen utama penelitian guna menjaga sensitivitas budaya dan meminimalkan bias interpretatif (Cunliffe, 2016). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi metode dan sumber serta keterlibatan lapangan yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PEMBAHASAN

Akuntabilitas dalam masyarakat adat pada dasarnya tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan akuntansi formal yang mengandalkan angka, laporan, dan prosedur baku. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa praktik akuntabilitas di Masyarakat Adat Cireundeu dibangun melalui keterpaduan dimensi material, sosial, ekonomi, dan spiritual yang saling menopang dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kajian antropologi akuntansi menegaskan bahwa pengetahuan lokal atau *local wisdom* berfungsi sebagai perangkat sosial yang mampu menciptakan ketertiban, transparansi, dan rasa tanggung jawab tanpa bergantung pada sistem akuntansi modern (Gunawan, 2022). Dalam konteks ini, Cireundeu merepresentasikan praktik akuntabilitas berbasis budaya yang hidup dan berfungsi secara nyata.

Komunitas Cireundeu, yang menjadikan singkong sebagai identitas budaya dan sumber pangan utama, menunjukkan bahwa tradisi dan spiritualitas dapat menjadi dasar sistem akuntabilitas yang efektif. Hal ini sejalan dengan pandangan (Herlambang, 2023) bahwa struktur adat sering menghasilkan bentuk akuntabilitas moral yang justru lebih kuat daripada mekanisme formal, terutama dalam masyarakat yang memiliki kohesi sosial tinggi. Dalam praktiknya, akuntabilitas tidak dipahami sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai upaya menjaga keseimbangan relasi antara manusia, alam, dan warisan leluhur.

Analisis tematik dalam konteks Cireundeu sejalan dengan literatur internasional yang menunjukkan bahwa ketahanan sistem pangan adat dibangun melalui keterpaduan aspek ekologis, sosial, ekonomi, dan spiritual yang tidak dipisahkan dalam praktik kehidupan sehari-hari (Whyte, 2018; Escobar, 2020). Penelitian mengenai komunitas adat di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa akuntabilitas komunitas terhadap sistem pangannya terkait erat dengan pemahaman bersama tentang hubungan manusia dan alam serta nilai-nilai budaya yang kuat, yang secara kolektif mendukung ketersediaan dan akses pangan di masa ketidakpastian.

Akuntabilitas Material: Pengelolaan Fisik Pangan yang Mandiri

Dari sisi material, akuntabilitas Cireundeu tampak melalui sistem pengelolaan pangan berbasis singkong yang dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan. Ketidaktergantungan pada beras pemerintah tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis dalam mengelola pangan lokal, tetapi juga mengisyaratkan komitmen kolektif terhadap keberlanjutan pangan komunitas. Kemandirian ini berfungsi sebagai wujud tanggung jawab material yang memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat selalu memiliki akses pangan yang stabil.

Meskipun tidak memiliki jurnal akuntansi atau inventaris formal, masyarakat Cireundeu memiliki mekanisme estimasi fisik terhadap ketersediaan singkong yang sangat akurat. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Wicaksono, 2021) yang menunjukkan bahwa masyarakat adat sering menggunakan *inventory knowledge* berbasis pengalaman turun-temurun. Secara fungsional, pengetahuan ini berperan mirip seperti sistem pencatatan modern karena mampu memastikan kecukupan dan kontinuitas persediaan. Masyarakat juga menggunakan pengetahuan tersebut untuk menentukan waktu panen, sehingga produksi Rasi tetap berlangsung secara konsisten sepanjang tahun. Hal ini menggambarkan apa yang disebut (Prabowo, 2022) sebagai *embedded accountability*, yaitu bentuk akuntabilitas yang tertanam dalam praktik hidup sehari-hari dan tidak membutuhkan pemaksaan eksternal.

Dimensi Ekonomi: Singkong sebagai Aset Produktif dan Instrumen Kesejahteraan

Keberhasilan pengelolaan pangan secara material selanjutnya membuka ruang bagi berkembangnya dimensi ekonomi yang tetap berakar pada nilai adat dan prinsip kolektivitas. Pada dimensi ekonomi, singkong bukan hanya diposisikan sebagai bahan pokok konsumsi, tetapi juga sebagai aset produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah. Pengolahan singkong menjadi berbagai produk seperti keripik, egg roll, dan Rasi kemasan menunjukkan adanya aktivitas produksi dan distribusi yang terorganisasi secara lokal. Studi oleh (Gibson, Martin, Wright, 2016) menegaskan bahwa ekonomi berbasis komunitas (*community-based economy*) mampu menciptakan nilai ekonomi tanpa harus mengorbankan nilai sosial dan budaya lokal. Temuan ini sejalan dengan studi terbaru yang menegaskan bahwa sistem ekonomi berbasis komunitas dan pangan lokal berkontribusi signifikan terhadap resiliensi sosial dan keberlanjutan ekonomi rumah tangga (*Food and Agriculture Organization*, 2021; Rosol et al., 2022). Artinya, terdapat mekanisme ekonomi lokal yang memiliki karakter serupa dengan agribisnis skala kecil. Hal ini sejalan dengan analisis (Kusnadi, 2020), yang menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki kemampuan adaptif dalam mengembangkan komoditas lokal menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Selain meningkatkan pendapatan, aktivitas ekonomi berbasis singkong ini juga memperluas potensi wisata desa, sebagaimana ditunjukkan (Lestari,

2023) dalam kajiannya mengenai industri kreatif di kawasan adat. Dengan demikian, dimensi ekonomi dalam sistem akuntabilitas Cireundeu bukan hanya soal mengelola sumber daya, tetapi juga soal menjaga kesejahteraan jangka panjang komunitas.

Akuntabilitas Spiritual: Amanah Leluhur sebagai Sistem Pengendalian

Namun, dimensi material dan ekonomi tersebut tidak dapat dipisahkan dari landasan spiritual yang menjadi sumber legitimasi dan pengendali utama perilaku sosial masyarakat Cireundeu. Dimensi spiritual merupakan aspek paling fundamental dalam struktur akuntabilitas masyarakat Cireundeu. Larangan adat untuk tidak mengonsumsi nasi dipahami sebagai amanah leluhur yang mengikat secara moral dan spiritual, bukan sekadar aturan konsumsi pangan. Konsep ini beririsan dengan spiritual accountability yang dibahas oleh (McKernan & Kosmala, 2019), yang menempatkan tanggung jawab moral dan etis sebagai inti dari praktik akuntabilitas alternatif. Pelanggaran terhadap larangan ini dipahami sebagai bentuk pengingkaran terhadap janji leluhur dan dapat menurunkan integritas individu di mata komunitas. Dalam kerangka ini, akuntabilitas spiritual berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang bersandar pada kesadaran dan rasa hormat, bukan pada sanksi formal. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan (Supriyanto, 2021), yang menyatakan bahwa nilai sakral sering menjadi sumber pengendalian sosial yang kuat dalam masyarakat adat.

Filosofi Pangan Sebagai Laporan Hidup

Slogan adat Cireundeu: “Teu nyawah asal boga pare, teu boga pare asal boga beas, teu boga beas asal bisa nyangu, teu nyangu asal dahar, teu dahar asal kuat”, dipahami sebagai bentuk laporan kehidupan yang berfungsi menilai kondisi seseorang. Pepatah ini menggarisbawahi bahwa tujuan utama bukan sekadar memiliki padi atau beras, tetapi memastikan bahwa seseorang mampu bertahan hidup secara sehat dan kuat. Dalam sudut pandang akuntansi, ini menggambarkan orientasi pada substansi ketahanan, kecukupan, dan keberlangsungan hidup daripada sekadar bentuk simbolis kesejahteraan. (Gray, 2021) menyatakan bahwa akuntabilitas berbasis substansi merupakan fondasi penting bagi pengembangan *sustainability accounting* yang benar-benar kontekstual dan berkeadilan. Hal tersebut sesuai dengan konsep *substance-based accountability* yang dijelaskan (Hakim, 2022), yakni akuntabilitas yang menitikberatkan pada makna dan esensi kehidupan daripada angka atau bentuk formal belaka.

Secara konseptual, praktik tersebut menunjukkan, filosofi pangan tersebut berfungsi sebagai dasar bagi sistem akuntabilitas nonformal yang mengatur bagaimana masyarakat menilai kecukupan, kesejahteraan, dan etika kehidupan sehari-hari. Struktur nilai ini memperkuat pemahaman bahwa akuntabilitas tidak selalu membutuhkan perangkat formal. Dalam konteks Cireundeu, akuntabilitas hadir sebagai bagian dari cara hidup, bukan sebagai tuntutan administratif yang harus dipenuhi.

Temuan ini mendukung gagasan bahwa ketahanan pangan yang dicapai oleh masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dari hubungan spiritual maupun kultural mereka dengan lingkungan. Sebagaimana ditunjukkan oleh studi kasus komunitas adat di dunia lain, keterlibatan aktif anggota komunitas dalam praktik *food governance* dan *food sovereignty* mendukung adaptasi terhadap risiko eksternal, memperkuat solidaritas, serta menciptakan

sistem pertanggungjawaban yang berakar pada identitas budaya dan nilai moral. Hal ini sejalan dengan konsep akuntabilitas nonformal yang ditemukan di Cireundeu.

Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam konteks masyarakat adat beroperasi sebagai praktik kehidupan yang kontekstual dan bermakna, melampaui batasan konseptual akuntansi formal modern.

PENUTUP

Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dengan menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam konteks masyarakat adat beroperasi sebagai praktik kehidupan yang terintegrasi, di mana dimensi spiritual dan material tidak dapat dipisahkan dalam menopang ketahanan pangan komunitas.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa ketahanan pangan di Kampung Adat Cireundeu tidak hanya merupakan hasil pengelolaan material, tetapi merupakan produk dari sistem akuntabilitas spiritual dan sosial yang terinstitusionalisasi dalam praktik adat. Temuan ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas tidak diwujudkan melalui dokumen akuntansi formal atau laporan numerik yang terstandar, melainkan melalui komitmen etis, musyawarah komunal, pelaksanaan ritual adat, serta tanggung jawab bersama terhadap alam, leluhur, dan anggota komunitas. Temuan ini menegaskan bahwa mekanisme akuntabilitas yang tertanam dalam budaya mampu menopang ketahanan pangan jangka panjang, khususnya melalui pemanfaatan singkong sebagai pangan pokok dan pengelolaan sumber daya pangan secara kolektif.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pembuktian empiris bahwa praktik etno-akuntansi dapat berfungsi secara efektif di luar kerangka akuntansi formal modern. Akuntabilitas spiritual berperan sebagai landasan moral dan normatif yang mengarahkan perilaku serta memperkuat disiplin kolektif, sedangkan akuntabilitas material menjamin keberlanjutan operasional melalui pengaturan bersama dalam produksi, penyimpanan, distribusi, dan konsumsi pangan. Interaksi kedua dimensi tersebut membentuk struktur akuntabilitas yang kokoh, meningkatkan kepercayaan, kohesi sosial, dan keberlanjutan. Hal ini menegaskan bahwa akuntansi perlu dipahami sebagai praktik sosial dan kultural, bukan semata-mata instrumen teknis.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penggunaan pendekatan kualitatif etnografi pada satu komunitas adat membatasi generalisasi temuan ke konteks budaya atau wilayah lain. Keterbatasan ini bukan merupakan kesalahan metodologis, melainkan konsekuensi dari karakter penelitian etnografi yang menekankan kedalaman konteks dibandingkan keluasan representasi. Kedua, ketiadaan catatan tertulis formal dalam komunitas menyebabkan interpretasi praktik akuntabilitas sangat bergantung pada observasi dan narasi partisipan. Kondisi ini berpotensi menghadirkan subjektivitas, namun tidak mengurangi validitas penelitian karena merupakan karakter inherent dari sistem nonformal berbasis budaya. Upaya mitigasi dilakukan melalui keterlibatan lapangan yang berkelanjutan, triangulasi sumber data, dan analisis reflektif.

Secara praktis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ketahanan pangan dan program pengembangan masyarakat akan lebih efektif apabila mengakui dan mengintegrasikan nilai budaya lokal serta dimensi spiritual, alih-alih mengandalkan model standar yang bersifat eksternal. Bagi disiplin akuntansi, penelitian ini menegaskan relevansi etno-akuntansi sebagai kerangka alternatif untuk memahami akuntabilitas dalam konteks masyarakat adat dan nonkorporasi. Penelitian selanjutnya

disarankan untuk melakukan studi komparatif lintas komunitas adat atau mengombinasikan pendekatan partisipatif dan kualitatif guna memperkuat ketelitian metodologis tanpa mengabaikan sensitivitas budaya. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya konteks budaya dalam kajian akuntabilitas

DAFTAR PUSTAKA

- Ahrens, T., & Chapman, C. S. (2020). The role of management accounting in social and environmental accountability. *Accounting, Organizations and Society*, 85, 101116. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2020.101116>
- Bebbington, J., Unerman, J., & O'Dwyer, B. (2020). *Sustainability accounting and accountability*. London: Routledge.
- Cunliffe, A. L. (2016). On becoming a critically reflexive practitioner. *Journal of Management Education*, 40(6), 747–768. <https://doi.org/10.1177/1052562916674465>
- Escobar, A. (2020). *Pluriversal politics: The real and the possible*. Durham: Duke University Press.
- Food and Agriculture Organization. (2021). *Indigenous peoples' food systems: Insights on sustainability and resilience*. Rome: FAO.
- Gibson, K., Martin, D., & Wright, S. (2016). Community economies: Economic activism and rural development. *Journal of Rural Studies*, 47, 161–168. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.07.012>
- Gray, R. (2021). The social accounting project and *Accounting, Organizations and Society*. *Accounting, Organizations and Society*, 93, 101256. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2021.101256>
- Gray, R., Adams, C., & Owen, D. (2014). *Accountability, social responsibility and sustainability*. Harlow: Pearson Education.
- Gunawan, J. (2022). Local wisdom and accountability practices in indigenous communities. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 18(3), 420–438. <https://doi.org/10.1108/JAOC-05-2021-0074>
- Hakim, L. (2022). Substance-based accountability and sustainability practices. *Journal of Accounting and Society*, 4(2), 95–110.
- Herlambang, Y. T. (2023). Akuntabilitas moral dalam masyarakat adat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 55–70. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2023.14.1.04>
- Kusnadi. (2020). Strategi ketahanan ekonomi masyarakat adat melalui komoditas lokal. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 28(2), 134–148.
- Lestari, D. (2023). Industri kreatif berbasis kearifan lokal pada desa adat. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 7(1), 45–60.
- McKernan, J. F., & Kosmala, K. (2019). Accounting, accountability and spirituality. *Critical Perspectives on Accounting*, 61, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2018.04.001>
- Prabowo, H. Y. (2022). Embedded accountability in community-based resource management. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 12(4), 678–695. <https://doi.org/10.1108/JAEE-09-2021-0273>
- Roberts, J. (2018). Managing only with transparency: The strategic functions of ignorance. *Accounting, Organizations and Society*, 66, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2018.01.002>



- Rosol, M., Béal, V., & Mössner, S. (2022). Community food governance and urban resilience. *Local Environment*, 27(2), 231–248. <https://doi.org/10.1080/13549839.2021.2015369>
- Supriyanto, A. (2021). Nilai sakral sebagai mekanisme pengendalian sosial masyarakat adat. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 201–218.
- Wicaksono, A. (2021). Indigenous inventory knowledge and food sustainability. *Journal of Rural Studies*, 82, 275–284. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.01.012>
- Whyte, K. P. (2018). Indigenous science and sustainability. *Sustainability Science*, 13(2), 1–13. <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0549-9>